

RINGKASAN

Judul Tesis: Rekrutmen Kader Partai Politik Dalam Strategi Politik Negara Orde Baru: Studi Kasus Tentang Rekrutmen Politik Pada Kader Partai Demokrasi Indonesia di Kotamadya Malang

Oleh : Petir Pudjantoro

Tesis ini tidak lain merupakan usaha untuk memahami bentuk-bentuk rekrutmen politik beserta variasi tindakan politik kader PDI yang terjadi dalam proses seleksi kepemimpinan partai dan calon legislatif. Berkenaan dengan rekrutmen politik kader parpol, fenomena menarik yang ingin dipahami adalah bagaimanakah implikasi tindakan politik rasional-pragmatis yang menempatkan kader dalam posisi subordinasi negara di satu pihak, dan munculnya tindakan politik kritis dalam bentuk resistensi terhadap struktur politik negara di pihak lain, terhadap realitas kepolitikan PDI dalam Strategi Politik Negara Orde Baru.

Dengan demikian, penelitian tesis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang variasi bentuk rekrutmen kader PDI, ragam tindakan politik kader parpol yang terjadi pada kasus-kasus rekrutmen politik PDI beserta latar belakang dan alasannya, serta memperoleh pemahaman tentang dampak tindakan politik kader PDI dalam dinamika kooptasi oleh dan resistensi terhadap kepolitikan Negara Orde Baru. Hasil penelitian ini memberikan masukan bagi perbaikan pelaksanaan rekrutmen kader parpol untuk mewujudkan kemandirian politik dan penguatan kelembagaan parpol.

Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus ini, mengambil kasus-kasus rekrutmen politik dalam proses seleksi kepemimpinan partai maupun calon legislatif pada kader PDI Kotamadya Malang sebagai subyek penelitian. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam yang tidak terstruktur dan teknik wawancara terbuka yang panjang. Sedangkan analisis data menggunakan teknik analisis model interaktif. Proses analisis berlangsung secara siklikal, dimana kegiatan penelitian bersifat bolak-balik antara penyajian, reduksi, penarikan kesimpulan, dan verifikasi.

Praktik politik represif, kooptatif, korporatif dan hegemonik, menyebabkan Negara Orde Baru cenderung memposisikan elite parpol, termasuk elite PDI, pada posisi marginal dalam kekuasaan politik negara. Masuknya elite parpol ke dalam struktur politik resmi negara, lebih banyak ditentukan oleh kepentingan negara untuk menjaga citra politik sebagai negara demokrasi yang menghargai pluralitas. Elite parpol, sebenarnya diposisikan tidak lebih sebagai "ornamen politik" dan "ornamen demokrasi" dari negara. Kondisi internal PDI

yang selalu dirundung konflik berkepanjangan, kualitas kader yang belum mantap, kelangkaan sumber posisi dalam PDI, serta belum terlembaganya mekanisme internal penyelesaian konflik antar elite PDI, memudahkan kehadiran pihak eksternal mengkooptasi dan mensubordinasi elite PDI ke dalam hierarki politik negara.

Hasil penelitian menunjukkan bentuk rekrutmen politik konsensus unsur, regenerasi unsur, rekrutmen personal dan intervensif menonjol berlangsung di PDI. Sementara rekrutmen politik informal dan akomodasi faksi, ada namun tidak intensif terjadi. Sedangkan rekrutmen politik formal masih berlangsung secara sporadis dan belum sistemik. Menonjolnya praktik rekrutmen konsensus unsur dan regenerasi unsur, menyebabkan loyalitas kader jarang melampaui wilayah unsur asalnya. Sementara rekrutmen politik personal, menempatkan kader sebagai bagian dari tokoh yang sedang mengejar posisi politik maupun mempertahankannya. Tokoh-tokoh yang berkonflik membentuk faksi dan melakukan rekrutmen politik atas dasar nepotisme, cronisme maupun clientilisme terhadap kader PDI. Sementara, menonjolnya praktik kooptasi dan intervensi politik pemerintah, menyuburkan munculnya tindakan politik pragmatis, dimana kader cenderung menggantungkan diri pada restu dan legalitas formal pemerintah. Setiap aktor cenderung merupakan pemburu tujuan-tujuan dengan berbagai cara atau teknik untuk memperoleh capaian politik yang berkisar pada status, kekuasaan, dan ekonomi.

Selama ini tindakan politik kader cenderung dibagi dikotomik, yakni kelompok oportunistis dan idealis. Kelompok oportunistis cenderung memainkan peran akomodatif terhadap kekuasaan, bersikap pragmatis dan berorientasi pada pengejaran kekuasaan semata. Sedangkan kelompok idealis cenderung mengembangkan peran yang kritis terhadap kekuasaan dan berorientasi pada pengembangan kemandirian partai serta idealisme perjuangan. Namun dari observasi mendalam terhadap tindakan politik kader PDI, ditemukan varian-varian yang lebih beragam. Secara kategoris, ada lima varian pokok dari tindakan politik kader PDI dalam proses rekrutmen politik meliputi: tindakan politik kritis-substantif, radikal-pragmatis, akomodasionis-substantif, oportunistik-pragmatis, dan pragmatis-konservatif.

Dengan beragamnya varian tindakan politik kader PDI itu menunjukkan bahwa respon politik kader terhadap praktik politik Negara Orde Baru tidaklah semonolitik yang diduga orang. Sekalipun, tindakan politik yang rasional-pragmatis lebih nampak mengedepan. Namun sebagian kader parpol yang lain juga mengaktualkan sikap dan tindakan politik yang kritis-idealisme. Munculnya fenomena resistensi terhadap struktur politik resmi yang dibangun oleh penguasa membuktikan beragamnya varian tindakan politik itu. Dengan demikian, paling tidak ada dua varian besar tindakan politik kader PDI, yakni mereka yang lebih memilih bertindak akomodatif dan rasional-pragmatis, yang lebih memosisikan diri untuk mencari keuntungan politik dari sistem yang dibangun oleh penguasa, serta mereka yang mengembangkan sikap kritis, yang memiliki ke-

inginkan untuk merubah sistem dan tampil sebagai penentang sistem yang ada.

Terhadap kungkungan struktur politik neo-patrimonial yang dikembangkan oleh negara, kader yang memiliki tindakan rasional-pragmatis umumnya berusaha untuk mengoptimalkan struktur yang ada demi kepentingan dirinya. Mereka cenderung melakukan penyesuaian diri, bukan mengkritisi; membangun kompromi, bukan menolak; memanfaatkan dan bukan bersikap menentang terhadap struktur politik yang ada. Preferensi tindakannyaupun cukup bervariasi. Ada di antara mereka yang bersikap akomodatif karena terpaksa. Mereka ini umumnya mengalami cacat politik, cacat moral, cacat hukum maupun oleh sebab tekanan birokrasi. Sementara ada yang bersikap akomodatif karena pertimbangan pragmatisme politik.

Sedangkan kader yang memilih tindakan politik kritis cenderung menolak terhadap segala bentuk kooptasi dan rekayasa politik penguasa. Kekritisannya terekspresikan dalam berbagai pilihan sikap. Mereka yang mengalami powerlessness, memilih bersikap diam, tidak hirau lagi pada politik, atau mengalihkan kegiatannya pada wilayah sosial lain. Yang bersikap reaktif, menunjukkan sikap penentangan secara terbuka melalui protes, demonstrasi, petisi, pengacauan, bahkan pengrusakan. Sementara ada juga yang memilih berjuang dari dalam sistem maupun melakukan tindakan politik yang lebih substantif dan konsepsional.

Tindakan politik kritis di PDI secara fenomenal muncul pada gerakan Pro-Megawati. Hadirnya Mega dengan pengaruh sosial dan dukungan massa yang luas, nampak telah menjadi "simbol perlawanan" dari massa yang telah lama dialienasikan, dibatasi dan dimarginalkan posisi politiknya oleh negara, maupun "dieksploitasi" secara politik oleh tokoh partai. Besarnya dukungan massa, konsistensi Mega untuk menjunjung tinggi hukum dan konstitusi, munculnya simpati massa dan apresiasi media massa yang besar terhadapnya, maupun issue kerakyatan yang ingin diperjuangkannya, membuat Mega diduga akan semakin berkembang dan cenderung semakin tidak terbandung. Sekalipun harus tetap dikritisi, dengan munculnya gerakan resistensi Mega ini, setidaknya embrio gerakan untuk mengembalikan kemandirian parpol dan penegakan konstitusi telah muncul di PDI.

ABSTRACT

Key words: political recruitment, political action, cadre of Indonesian Democratic Party (PDI), political strategy of the New Order State

This thesis is in attempt to understand political recruitment forms and varieties political actions taken by the cadre of Indonesian Democratic Party (PDI) in the process of selecting party leadership and legislative candidate. Refer to the political recruitment of party cadre, the most interesting phenomena to study is how the implication of rational - pragmatic political action place its cadre in to a position of the state subordination at one side, and the emergence of critical action in the form of resistancy against the state political structure at another side, towards reality of PDI within the political strategy of the New Order States.

This research intended to gain a description of various forms of PDI recruitmen, various political actions taken by cadre of political party in case of political recruitment, and the background as well as its reasons, and obtaining information about the effect of political action taken by PDI cadre in its cooptation by and against the state. Findings of this research are expected to give knowledge about recruitment of political party cadre in political strategy of the New Order State, and to establish political otonomy and empowering political party institution.

Qualitative research with a case studi approach takes political recruitment cases in the process of selecting party leadership an legislative candidat of PDI cadre in Malang municipality as the research subyect. The data collection is conducted by using indepth interview, and long open ended interview, while the data analysis is conducted by using interactive model. The analysis process goes on cyclically, in which the research activity the is interaction betwen data display, data reduction, conclusion drawing and verifying.

Implementation politic of represive, cooptative, corporative and hegemonic causes the New Order State tends to place party elite including the PDI elites at a marginal position. The party elite can be accepted within the formal political structure of the state, dominantly ditermined by the state interest to keep political image as a democratic state which respect diversity. Party elite, in fact, just as "a political and democratic ornament " of the state. The internal condition of PDI which has unsolved conflicts, low quality of cadre, limited power resources owned by PDI and the uninstitutionalized internal mechanism to solve the

conflicts among PDI elites, attracts the external party to cooptate and subordinate the PDI elite into state political hierarchy.

The findings display political recruitment forms: "Konsensus Unsur", "Regenerasi Unsur", "Rekrutmen Politik Personal", and "Rekrutmen Politik Intervensif" which frequently occur in the recruitment. It has, anyway, "Rekrutmen Politik Informal" and "Akomodasi Faksi", but they are not frequently used. Meanwhile, the "Rekrutmen Politik Formal" is not conducted systematically and well-planned. The domination of "Konsensus Unsur" and "Regenerasi Unsur" recruitment, cause the cadre more loyal to its origin than to the party. And the "Rekrutmen Politik Personal" places the cadres as part of figures who compete for position and how to maintain their establishment. Those figures create faction and conduct the political recruitment based on nepotism, cronism, and clientilism towards PDI cadre. While, the domination of cooptation and the government political intervention, motivates the appearance of pragmatic political action, in which the PDI cadre tend to depend on the government recognition. Every actor tends to be hunters to reach their goals by all means to get status, power, and wealth.

So far, political action of cadre tends to be dichotomic: opportunist and idealist groups. Opportunist group tends to play an accomodative role towards power, in which he or she thinks pragmatically to gain power. While, the idelaist tends to develop critical role against the state and increase the party otonomy. In a deeper observation, however, towards PDI cadre, it is found more various variant. They are categorized into: "Tindakan Politik Kritik-Subtantif", "Radikal-Pragmatis", "Akomodasionis-Subtantif", "Oportunistis-Pragmatis", and "Pragmatis-Konservatif".

These various variant of political action stated above shows that political respond of party cadre towards the New Order State is not the only way like what the people think. Eventhough, political action of "rational pragmatic" is more dominant, but some other party cadres also conduct as a critical-idealist. These resistancy phenomena against the formal political structure built by authority proves the variety of variant of political action. Therefore, there are two major variants in political action of PDI cadre, namely those who choose "akomodatif and rational" action and place themselves to get political benefit from a system built by the authority, and those who develop "sikap-kritis" and tend to resist the established system.

Towards the pressure of neo-patreminial political structure developed by the state, cadre who has rational-pragmatic action tries to optimize the structure available for his/her own interest. They tend to adapt themselves instead of criticizing, become more compromise than refusing, make use instead of resisting against the political structure available, and they have various

political action preferency. Some of them choose accomodative-attitude because they are under pressure: "cacat politik", "cacat moral", and "cacat hukum" or bureaucratic pressure. While, some others take accomodative-attitude because of pragmatic cosideration.

Cadres who choose critical-attitude tend to refuse any form of political engineering by the authority. Their being critical-attitude is expressed in various attitude choices. Those who undergo powerlessness, tend to keep silent and ignore political affairs or doing retreatment, and making activities in other fields. Those who choose reactive-attitude tend to resist openly by protesting, demonstrating, petition, rioting, and distructing. While some others prefer to struggle from inner system and take political actions which are more substantial and conceptional.

The phenomena of critical action in PDI is found at the movement of Pro-Megawati. The present of Megawati with her social influence and widely-spread mass-support seems to be: "Symbol of Resistance" from grass-roots who have been neglected, restricted and marginalized by the state, as well as being "exploited" by political party figures. The big amount of mass-support, consistency Megawati to respect law and constitution, the emerge of the mass-sympathy and mass-media appreciation towards her, as well as people issues she is struggling, make her bigger and uncontrolable. Megawati tendency of being bigger need to be observed and evaluated, so her struggles are always on the right track and enable her establish democratic atmosphere based on law and constitution enforcement.